

Kerja Sama Internasional Untuk Menangani Kejahatan Bidang Perikanan

Mahendra Putra Kurnia

Faculty of Law Mulawarman University

Disampaikan Pada Kuliah Umum Hukum Internasional “Organized Crime in The Fisheries Sector (Kejahatan Terorganisir di Sektor Perikanan)”

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Tarakan, Jumat, 21 Oktober 2022

REPUBLICA.co.id
Sunday, 6 Muharram 1443 / 15 August 2021

HOME NEWS NUSANTARA KHAZANAH ISLAM DIGEST INTERNASIONAL **EKONOMI**

REPUBLICA TV ENGLISH KONSULTASI IN PICTURES

Telkomsel
Solusi praktis untuk yang sering Tethel
Orbit
Satu internet aja sudah gak cukup selalu sedia Telkomsel Orbit untuk mendukung internet rumah kamu agar bisa terus produktif tanpa hambatan

Home > Ekonomi > Ekonomi

Menteri Susi: Kejahatan Perikanan Ancam Kemanusiaan

Senin 14 Oct 2019 14:06 WIB

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA

Search MASUK LANGGANAN KOMPAS

NEWS TREND HEALTH FOOD EDUKASI PARAPUAN MONEY TEKNO LIFESTYLE HOMEY PROPERTI BOLA TRAVEL OTOMOTIF SAINS HYPE VIK KOLOM JEO IM

Home / Regional

Negara Merugi hingga Rp 30 Triliun Tiap Tahun akibat Pencurian Ikan di Natuna

Kompas.com - 12/04/2021, 17:28 WIB

REPUBLICA.co.id
Tuesday, 9 Muharram 1443 / 17 August 2021

HOME NEWS NUSANTARA KHAZANAH ISLAM DIGEST INTERNASIONAL **EKONOMI** REPUBLIKBOLA LEISURE

KONSULTASI IN PICTURES SASTRA INDEKS

Iklan oleh Google
Stop lihat iklan ini Mengapa iklan ini? Ⓞ

Home > Ekonomi > Ekonomi

IUU Fishing Rugikan Indonesia Rp 45 Triliun Per Tahun

Rabu 09 Sep 2020 19:56 WIB
Red: Irwan Kelana

suaramerdeka.com/nasional/pr-04105260/kejahatan-perikanan-berkembang-menjadi-kejahatan-transnasional

Nasional Internasional Jawa Tengah Semarang Raya Ekonomi Olahraga Bola Psis

Kejahatan Perikanan Berkembang Menjadi Kejahatan Transnasional

Andika Primasiwi - Senin, 29 Juli 2019 | 15:00 WIB

**The Reality
of Fisheries
Crime in
Indonesia**

**Illegal,
Unreported,
And
Unregulated
(IUU)
Fishing.**

IUU FISHING

- Ancaman serius untuk sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, terutama menyebabkan “ecological damage”.
- Berdasarkan laporan Food and Agriculture Organization (FAO), the world lost 11-26 million tons of fishery resources as a result of IUU fishing.
- Berdampak besar pada sektor perekonomian dan menimbulkan banyak masalah sosial di beberap negara.
- Beberapa pihak yang terlibat dalam kejahatan perikanan juga terlibat dalam “transnational organized crime activities”, seperti pencucian uang, penyuapan, penyelundupan narkoba, penyelundupan orang, human trafficking, perbudakan, kejahatan pajak, penyelundupan barang, dan lain-lain.

- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
- Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1993.
- United Nations Implementing Agreement 1995.
- Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995.
- International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001 (IPO on IUU Fishing 2001).

IUU Fishing

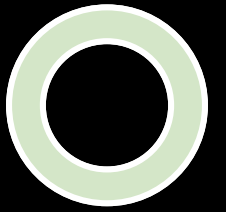
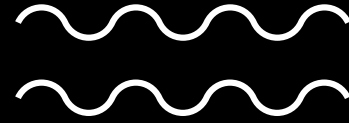
International

Regulations

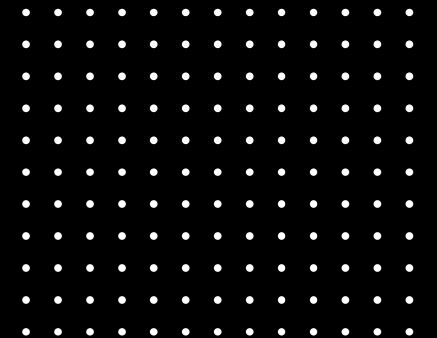
IUU Fishing INDONESIAN REGULATIONS

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
- UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut

Indonesian law and international law have actually regulated IUU fishing, **but they have not been categorized as transnational organized crime**



Today



UN Convention Against Transnational Organized Crime (Article 3. Scope of application, par.2)

- a. it is committed in more than one state;*
- b. it is preparation, planning, direction or control takes place in another state;*
- c. it is committed in one state but involves an organized in criminal activities in more than one state or;*
- d. it is committed in one state but has substantial effect in another state.*

organized criminal group: a structured group of three or more persons. Existing for period of time and acting in concert with offences, established in accordance with these convention in order to obtain, directly or indirectly a financial or other material benefit". (Article 2. a)

Transnational Organized Crime

UPAYA INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

BERANDA ORGANISASI PROGRAM BERITA PUBLIKASI INFORMASI

Indonesian English

Google Translate

Foto Berita Deputi Deputi 1

Kemenko Marves Tekankan Indonesia akan Perangi Kegiatan Penangkapan Ikan Ilegal dan Lindungi Pelaut Serta ABK

Dibaca: 46 | Oleh Biro Komunikasi | Rabu, 24 Februari 2021

mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/389102/indonesia-ajak-anggota-pbb-cegah-kejahatan-transn

HOME NEWS VIEWS FOTO VIDEO INFOGRAFIS WEEKEND SEPAK BOLA HIBURAN

Bitcoin Up

Minggu 07 Maret 2021, 16:35 WIB

Indonesia Ajak Anggota PBB Cegah Kejahatan Transnasional

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

KEJAHATAN PERIKANAN: Indonesia Perjuangkan Kesepakatan Pencegahan di PBB

Indonesia terus berusaha agar kejahatan perikanan menjadi perhatian global dan melahirkan kesepakatan pencegahan di PBB.

Newswire - Bisnis.com
28 Mei 2017 | 08:25 WIB

TEMPO 76 INDONESIA MERDEKA

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF

HOME > BISNIS >

Menteri Susi Serukan Illegal Fishing Jadi Kejahatan Lintas Negara

Reporter: Dias Prasongko
Editor: Rahma Tri
Senin, 22 Juli 2019 19:28 WIB

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Regulasi PPID

Beranda Profil Unit Kerja Eselon 1 Informasi Publikasi Layanan Publik Transparansi Kinerja

Kilas Berita ▶ KKP JABARKAN KETENTUAN KEPEMILIKAN PULAU DI INDONESIA

Home / Berita / Peringati International Day for Fight Against IUU Fishing, Menteri Trenggono Ajak Seluruh Negara Bersatu Berantas IUU Fishing

Peringati International Day for Fight Against IUU Fishing, Menteri Trenggono Ajak Seluruh Negara Bersatu Berantas IUU Fishing

BERITA SATU

Masukan kata kunci

LIVE TV E-PAPER E-PAPER NASIONAL POLITIK DUNIA

EKONOMI | Makro Pasar Modal Bisnis Bank Properti Infras

INDEX -11 | INFRASTRUC 1036 (0) | Investor33 406 (-3) | ISSI 176 (-1)

Home > Ekonomi

Ini Rekomendasi Indonesia terkait Kejahatan Perikanan

Selasa, 30 Juli 2019 | 22:52 WIB
Oleh : HA

Upaya untuk Menjadikan Kejahatan Perikanan sebagai transnational organized crime (internal)

- Mengambil langkah tegas untuk tidak berkompromi dengan IUU Fishing.
- Memperkuat infrastruktur pengawasan bidang perikanan.
- Menghargai negara lain dengan tidak mempraktekkan IUU Fishing di wilayah negara mereka.
- Melakukan penegakan hukum secara konsisten (sepanjang 2021, KKP telah menangkap 94 vessels terdiri dari 70 kapal penangkap ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 24 kapal penangkap ikan asing yang mencuri ikan (6 Malaysian-flagged vessels, 2 Philippine-flagged vessels and 16 Vietnamese-flagged vessels). KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku penangkapan ikan dengan metode penangkapan ikan yang merusak seperti bom ikan, setrum atau racun.
- Insentif ekonomi bagi pelaku usaha yang patuh.
- Memperkuat tata Kelola pemerintahan terutama di bidang perikanan.

- Jadikan IUU Fishing sebagai musuh global yang harus diberantas demi perikanan berkelanjutan.
- Pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir tentu tidak dapat dilakukan oleh satu negara dan perlu dilakukan melalui kerja sama internasional.
- Transparansi global dan perjanjian perjanjian di setiap pelabuhan negara (terkait dengan data kapal, terutama di laut lepas)
- Melaksanakan Blue Paper 15 on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing & Blue Paper 16 on Transnational Organized Crime in Fisheries.
- Pembentukan norma-norma dasar yang diterima secara internasional, optimalisasi peran lembaga/organisasi internasional, dan pembentukan jaringan permanen dalam penanganan kasus untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar negara dan dengan lembaga internasional.
- Komitmen dan aksi bersama, menjadikan IUU fishing sebagai kejahatan lintas negara dan mem bahas nya di PBB sehingga bisa menjadi *hard law*.

**Upaya untuk Menjadikan
Kejahatan Perikanan
sebagai transnational
organized crime (external)**

REFERENSI

- *Desia Rakhma Banjarani*, *Illegal Fishing* dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional , *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 2 Agustus 2020, h. 150-162.
- *Kartini Sekartadji*, 2006, Trans Organized Crime (TOC): Trend Kejahatan Baru dan Permasalahannya di Indonesia; Makalah dalam Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Undip, 6-8 Juni 2006, Semarang.
- *Mahendra Putra Kurnia*, 2019, Pemerintah Daerah dan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Hambatan dan Tantangan), ISILL Book Series Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia, hlm 17-34.
- *Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.558/SJ.5/VI/2021*.
- and several websites for images and news that are accessed on August 17, 2021 at 15.00 WITA.

SUMBER BERITA BLUE PAPER 15 DAN 16

- <https://kkp.go.id/brsdm/artikel/12240-the-high-level-panel-workshop-on-iuu-fishing-and-organized-crimes-in-the-fishing-industry>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190724/99/1127948/apa-itu-blue-paper-15-dan-16-yang-disusun-indonesia>

Terima Kasih



Thank You

